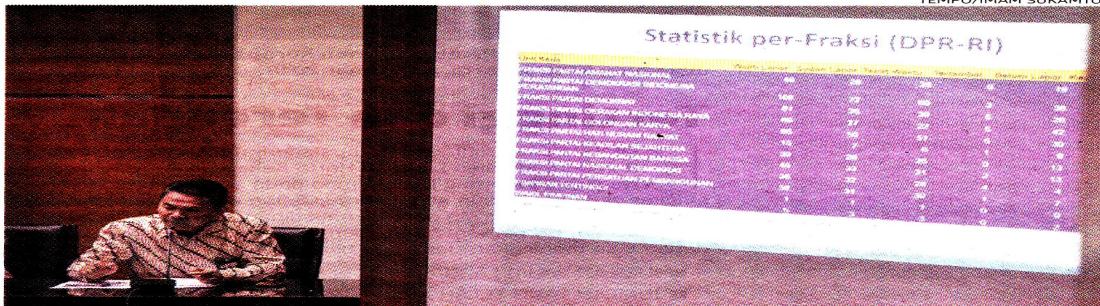


Judul : Partai perintahkan Anggota DPR lapor LHKPN
Tanggal : Selasa, 09 April 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 13



Direktur LHKPN Isnaini, memberikan keterangan terkait dengan LHKPN di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin lalu.

Partai Perintahkan Anggota DPR Laporkan LHKPN

Tingkat kepatuhan anggota DPR untuk melaporkan harta kekayaan masih rendah.

Rezki Alvionitasari
rezki.alvionita@tempo.co.id

JAKARTA — Partai-partai politik meminta kader mereka yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyertakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan itu diungkapkan sejumlah petinggi partai menyusul pengumuman KPK yang menyebut tingkat kepatuhan DPR dalam melaporkan LHKPN masih rendah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mengatakan partainya telah mewajibkan semua kader partainya yang menjadi anggota DPR menyertakan LHKPN. Anggota DPR atau DPRD yang maju kembali sebagai calon legislator diharuskan

menyertakan LHKPN sebelum pemilihan umum pada 17 April mendatang. "Yang pasti akan segera dilaporkan, mungkin kawan-kawan sibuk atau enggak *ngerti* buat laporannya," ucap Arief saat dihubungi, kemarin.

Menurut Arief, partainya sangat mendukung penyertakan LHKPN karena hal itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah korupsi. Partai Gerindra, Arief melanjutkan, adalah partai yang memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. "Kewajiban dari partai untuk meminta mereka melaporkan (LHKPN). Sebelum *coblosan*, mereka harus menyelesaikan LHKPN itu," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Willy Aditya menyatakan bahwa partainya sejak awal berkomitmen untuk patuh pada kewajiban pelaporan LHKPN bagi anggota legislatif. "Ini merupakan

komitmen. Bagaimana komitmen ini harus dijalankan. Ini bukti bahwa demokrasi itu adalah basisnya akuntabilitas dan transparansi bagaimana seorang anggota Dewan harus bisa diakses oleh publik," kata Willy di Jimbaran, Bali, kemarin.

Menurut dia, politik yang transparan adalah salah satu modal untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap calon legislator serta partai politik. "NasDem mengedepankan politik yang akuntabel dan transparan. Bagaimana publik kembali memiliki kepercayaan kepada institusi politik, khususnya anggota Dewan, yang menjadi representasi mereka," ujar Willy.

Ia meminta para kader NasDem, yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN, segera memenuhi kewajiban tersebut. Partainya telah mengirim surat imbauan kepada para



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Masih Banyak yang Tidak Patuh

TINGKAT kepatuhan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN masih rendah. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Senin lalu, hanya 63,82 persen anggota DPR yang telah memberikan laporan harta kekayaan mereka ke KPK. Tingkat kepatuhan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra paling rendah. ● AJI NUGROHO

Partai Gerindra

Jumlah anggota DPR: 69
Telah menyetorkan LHKPN: 27
(22 tepat waktu, 5 terlambat)
Belum menyetorkan LHKPN: 42
Tingkat kepatuhan: **39,13%**

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Jumlah anggota DPR: 15
Telah menyetorkan LHKPN: 7
Belum menyetorkan LHKPN: 8
Tingkat kepatuhan: **46,67%**

Partai Demokrat

Jumlah anggota DPR: 61
Telah menyetorkan LHKPN: 36
Belum menyetorkan LHKPN: 25
Tingkat kepatuhan: **59%**

Partai Amanat Nasional

Jumlah anggota DPR: 46
Telah menyetorkan LHKPN: 28
Belum menyetorkan LHKPN: 18
Tingkat kepatuhan: **60,87%**

Golkar

Jumlah anggota DPR: 86
Telah menyetorkan LHKPN: 56
Belum menyetorkan LHKPN: 30
Tingkat kepatuhan: **65%**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Jumlah anggota DPR: 108
Telah menyetorkan LHKPN: 56
Belum menyetorkan LHKPN: 30
Tingkat kepatuhan: **67%**

Partai Keadilan Sejahtera

Jumlah anggota DPR: 39
Telah menyetorkan LHKPN: 26
Belum menyetorkan LHKPN: 13
Tingkat kepatuhan: **67%**

Partai Kebangkitan Bangsa

Jumlah anggota DPR: 46
Telah menyetorkan LHKPN: 33
Belum menyetorkan LHKPN: 13
Tingkat kepatuhan: **72%**

Partai Persatuan Pembangunan

Jumlah anggota DPR: 38
Telah menyetorkan LHKPN: 31
Belum menyetorkan LHKPN: 7
Tingkat kepatuhan: **82%**

Partai NasDem

Jumlah anggota DPR: 36
Telah menyetorkan LHKPN: 32
Belum menyetorkan LHKPN: 4
Tingkat kepatuhan: **89%**

anggota Fraksi NasDem yang belum melaporkan LHKPN untuk segera melapor. "Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kejar, tapi kami akan kejar," tutur Willy.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menyerukan supaya semua anggota Fraksi PDIP menyetorkan LHKPN. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan partainya telah meminta semua kader PDIP yang menjadi anggota legislatif, terutama yang kembali menjadi calon legislator, untuk segera menyetorkan LHKPN. "Sudah diimbau, dan saya percaya mereka juga sudah sadar," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Senin lalu, KPK mengumumkan tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN. Hanya 63,82 persen dari total anggota DPR yang menyetorkan laporan harta kekayaan mereka. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tercatat paling rendah tingkat kepatuhannya. Dari 69 anggota Fraksi Gerindra, hanya 27 yang telah menyetorkan LHKPN. Posisi kedua dari bawah adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan tingkat kepatuhan sekitar 46,67 persen. Selanjutnya adalah Fraksi Partai Demokrat yang memiliki tingkat kepatuhan 57,38 persen.

Sebaliknya, Partai NasDem menjadi fraksi yang

paling tinggi tingkat kepatuhannya atau 88,89 persen. Menyusul Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mencapai 81,58 persen dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan tingkat kepatuhan 74 persen.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan salah satu indikator politik berintegritas adalah keterbukaan dan pelaporan LHKPN secara benar. "Kami berharap Pemilu 2019 ini lebih menghasilkan orang-orang baik sebagai presiden atau wakil presiden maupun sebagai wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD," ujarnya.

● M. ROSSENO AJI | IRSYAN HASYIM | ANTARA